



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra-OPD 2024-2026 dan disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2024 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa seperti potensi tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang telah merambah ke lingkungan keluarga dan pelaku teror berasal dari generasi milenial, terganggunya stabilitas regional Jawa Tengah akibat konflik pada

pembangunan proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan industri yang dikembangkan di beberapa daerah, terjadinya konflik sosial dan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda yang semakin meningkat serta permasalahan toleransi didalam masyarakat pluralisme seperti di Jawa Tengah yang berbeda agama, etnis dan penghayat kepercayaan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/5267/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
25. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0001788 tanggal 29 Februari 2024 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 13 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 840.528.463.000,- terdiri dari :

1. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 6.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024			
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
8		Urusan Pemerintahan Umum										
	8.01	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
		02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,40	3,40	3,89	114,41	-	-	
				Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	-	-	-	-	3,0	3,0	
			1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	Persentase	85	85	90	105,88	80	90
					Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	-	-	-	80	80	90
			03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,30	3,30	3,82	115,76	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	-	-	-	-	75,00	75,00	77,00
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase	90,50	90,50	93,93	103,79	-	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	Persentase	90,50	90,50	93,50	103,31	89	89	90
		Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	Persentase	90,50	90,50	93,30	103,09	89	89	90
		Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	Laporan	5	1	1	100%	-	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	Persentase	-	-	-	-	89	89	90
	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,39	3,39	3,50	112,54	-	-
		Indeks kinerja ormas	Nilai	-	-	-	-	75,34	75,34	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	100	100	100	100	-	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase	91,50	91,50	93,50	102,19	-	-	-
		Skor variabel program dan kegiatan ormas	Nilai	-	-	-	-	36,23	36,23	38,59
		Skor variabel sumber daya ormas	Nilai	-	-	-	-	39,11	39,11	41,23
	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai	3,39	3,39	3,40	100,29	-	-	-
		Indeks Penguatan Dampak Ekonomi		-	-	-	-	3.00	3.00	3.20
		Indeks Toleransi		-	-	-	-	74.10	74.10	74.50
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	100	100	100	100	-	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase	91,50	91,50	92,10	100,66	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024		
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
		Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase	-	-	-	-	85	85	90	
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase	-	-	-	-	85	85	90	
	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Nilai	2,9	2,9	3,45	118,97	-	-	-	
		Indeks kewaspadaan Nasional	Nilai	-	-	-	-	73.00	73.00	74.00	
	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan	Laporan	5	5	5	100	-	-	-	
		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase	85	85	92,64	108,99	85	85	100	
0	00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persentase	100	100	100	100	-	-	-
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persentase	-	-	-	-	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase	-	-	-	-	100	100	100
	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	180	180	180	100	-	-	-
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Persentase	-	-	-	-	100	100	100
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	5	5	5	100	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	-	-	-	-	12	12	100
	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-
		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	12	12	100
	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar Layanan	Persentase	-	-	-	-	100	100	100
	1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase	-	-	-	-	100	100	100
	1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	-	-	-	-	41	41	123
	1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Laporan	-	-	-	-	84	84	252
	1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	5	100	-	-	-
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	-	-	-	-	352	352	1056

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penyelenggaraan program ini dengan melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan para stakeholder terkait, memetakan permasalahan secara komprehensif dalam upaya penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan serta pelibatan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam setiap kegiatan untuk dapat berkontribusi langsung mengurai permasalahan yang ada.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Penyelenggaraan program ini dilakukan dengan meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga/ instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan, serta mendorong terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyelenggaraan program ini dilakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dikemas dalam bentuk edukasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif. Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penguatan kapasitas kualitas SDM atau anggota dan peningkatan kelembagaan ormas guna mewujudkan kemandirian ormas.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Penyelenggaraan program ini dengan mengoptimalkan forum-forum yang di masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga meminimalisir konflik antar umat beragama. Selain itu perlu adanya peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan generasi muda lainnya

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Manfaat penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang ikut serta dalam pelaksanaan keputusan politik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya

internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target kinerjanya semuanya melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	3,14	-	3,89	-	
	Indeks Ideologi Pancasila	-	-	-	3,00	-	100 %	
2	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	3,10	75,00	3,82	100%	
	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	-	-	-	75,00	-	100%	
3	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2,92	-	3,50		
	Indeks Kinerja Ormas	-	-	-	75,34	-	100%	
4	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	3,23		3,40		
	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	-	-	-	3,00	-	100%	
	Indeks Toleransi	-	-	-	75,00	-	100%	
5	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2,70	-	3,45		-
	Indeks kewaspadaan Nasional	-	-	-	73,00	-	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kestabilan politik;
- b. Meningkatnya Ketahanan bangsa.

Pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Perubahan perilaku masyarakat karena arus informasi yang deras melalui medsos yang berdampak terhadap ideologi bangsa secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh perilaku tersebut ditunjukkan melalui ekspresi beragama yang berlebihan dengan tidak mengindahkan toleransi sebagai budaya luhur bangsa;
 - b. Kurangnya antisipasi dan respons masyarakat terhadap konflik sosial yang terjadi. Masyarakat diharapkan bisa melakukan fungsi deteksi dan cegah dini terkait potensi-potensi konflik atau permasalahan di daerah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Kurang mandirinya ormas dalam partisipasi pembangunan
 - c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :

- a. Penyebaran informasi yang bermuatan politik identitas, ujaran kebencian hingga hoax yang berujung terjadinya perpecahan atau polarisasi di masyarakat Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

2.3.4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi unuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas.
16. Melakukan sosialisasi P4GN dan PN

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan

kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jawa Tengah	Indeks Ideologi Pancasila	3,00	2.803.000.000	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jawa Tengah	Indeks Ideologi Pancasila	3,00	2.803.000.000
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Indeks Kinerja Ormas	75,34	4.708.806.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Indeks Kinerja Ormas	75,34	4.708.806.000
C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jawa Tengah	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	3,23	1.796.400.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jawa Tengah	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	3,23	1.796.400.000
		Jawa Tengah	Indeks Toleransi	74,10	1.300.000.000		Jawa Tengah	Indeks Toleransi	74,10	1.300.000.000
D	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Indeks Kewaspadaan Nasional	73,00	15.966.400.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Indeks Kewaspadaan Nasional	73,00	15.966.400.000
E	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	75,00	43.032.538.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	75,00	43.032.538.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	3.000.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat
B.	HIBAH INSTANSI VERTIKAL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	10.000.000.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
C	HIBAH PARPOL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pendataan Parpol	38.419.042.000	Usulan Hibah Parpol yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Kerukunan ummat beragama di daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah;
4. Penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
6. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;
7. Pendidikan politik dan Penguatan ideology Pancasila bagi Pengurus Partai Politik;
8. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah;
9. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
12. Peningkatan efektivitas Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum uang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2025 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS;
2. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah;
3. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila;
4. Pembentukan Paskibraka Jawa Tengah;
5. Memperkuat sinergitas antar stakeholder guna pencegahan deradikalisasi;
6. Memberikan pemahaman dan mengajak ikut serta masyarakat untuk cegah dan deteksi dini terhadap paham radikalisme dan terorisme;

7. Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN dan PN dan Pelaksanaan Perda P4GN dan PN serta Efektifitas Timdu P4GN dan PN;
8. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas;
9. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama;
10. Pendidikan politik dalam rangka penguatan partisipasi politik terutama bagi pemilu pemula, perempuan dan kelompok rentan.
11. Peningkatan dan penguatan peran partai politik;
12. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran Pemerintah Jawa Tengah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2024 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut **"Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik"**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya stabilitas politik;
- b. Meningkatnya Ketahanan Bangsa

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,50
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	88,15
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko	2. Indeks Manajemen Resiko	Angka	3,6
2.	Meningkatkan kesatuan bangsa dan politik		Indeks IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,91
		1. Meningkatnya stabilitas politik	1. Indeks Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,80
		2. Meningkatnya ketahanan bangsa	2. Indeks IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,01

3.3. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen resiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis dilakuka proses manajemen resiko pada konteks resiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja	Pernyataan Resiko	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Unjuk rasa	12	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial 2. Peraturan Pemerintah yang tidak memihak masyarakat	Konflik sosial	1. Peningkatan deteksi dini 2. Pembuatan peta rawan konflik	Kepala Badan	2 tahun
Meningkatnya stabilitas politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Polarisasi	12	1. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 2. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 3. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis 4. Media yang berpihak/ tidak	1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Konflik horizontal masyarakat 3. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 4. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil)	1. Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia 2. Pendidikan Politik 3. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintahan provinsi dengan kab/kota dan menjadikan media,	Kepala Badan	2 tahun

				netral masyarakat		institusi pendidikan dan keagamaan sebagai mitra pilar demokrasi 4. Memperkuat Literasi media dan literasi politik		
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Intoleransi	12	1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila 2. Masih adanya sel-sel radikalisme di masyarakat yang belum teridentifikasi dan berpotensi mengganggu stabilitas ideologi Pancasila	1. Konflik sosial dimasyarakat 2. Disintegrasi bangsa	1. Kolaborasi dengan melibatkan unsur pentahelix untuk melakukan kegiatan kontra radikalisme. 2. Penguatan kontra radikalisme kepada pelajar melalui penyuluhan bahaya terorisme yang diisi oleh eks-napiter.	Kepala Badan	2 tahun
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan	Penyalahgunaan narkoba	12	1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba 2. Lemahnya pengawasan dari	1. Merusak mental generasi muda 2. Tingkat kejahatan dan penyakit sosial masyarakat meningkat	1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mencegah	Kepala Badan	2 tahun

	Politik			berbagai kalangan khususnya pemerintah 3. Faktor perekonomian		penyalahgunaan narkotika 2. Membuat konten-konten dan sosialisasi bahaya narkoba		
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekosobud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Intoleransi	12	adanya anggapan agama dan kepercayaannya yang paling benar	Konflik SARA	Mengoptimalkan forum-forum yang di masyarakat sehingga meminimalisir konflik antar umat beragama	Kepala Badan	2 tahun
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekosobud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Perselisihan ormas	9	1. Banyaknya kemunculan ormas-ormas baru 2. Kurangnya kemandirian ormas dalam rangka partisipatif pembangunan daerah	1. Menghambat pembangunan 2. Konflik sosial dimasyarakat	Pengelolaan data dan pelayanan pendaftaran ormas sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Kepala Badan	1 taun

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah							21.718.337.000		15.983.909.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74,5		75		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *						19.318.337.000		14.610.643.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	88,15	19.318.337.000	88,3	14.610.643.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				19.318.337.000		14.610.643.000		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	19.318.337.000	100	14.610.643.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				9.971.337.000		8.876.337.000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	12	9.971.337.000	12	8.876.337.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****			9.641.217.000		8.641.217.000			
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	54	9.641.217.000	54	8.641.217.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****			255.120.000		222.120.000			
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	255.120.000	12	222.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****			20.000.000		1.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Laporan	12	20.000.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****				15.000.000		1.500.000		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****				40.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	40.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***				100.000.000		80.000.000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	12	100.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				100.000.000		80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	100.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				650.000.000		310.500.000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	650.000.000	100	310.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				50.000.000		15.000.000		
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	50.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****			50.000.000		15.000.000			
				Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	12	50.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****			100.000.000		50.000.000			
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	80	100.000.000	80	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****			450.000.000		230.500.000			
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	280	450.000.000	280	230.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BANJARNEGARA; KARANGANYAR; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***			2.160.000.000		1.196.806.000			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	2.160.000.000	100	1.196.806.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****			50.000.000		45.000.000			
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	12	50.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****			300.000.000		200.000.000			
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	12	300.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****			200.000.000		100.000.000			
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	200.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****			250.000.000		180.000.000			
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	250.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****			120.000.000		85.000.000			
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	120.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****			60.000.000		25.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	50	60.000.000	50	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				100.000.000		55.650.000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	100.000.000	12	55.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				800.000.000		426.156.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	24	800.000.000	24	426.156.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				80.000.000		20.000.000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	12	80.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****			200.000.000		60.000.000			
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	8	200.000.000	8	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***			1.200.000.000		236.000.000			
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	41	1.200.000.000	41	236.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel ****			150.000.000		50.000.000			
				Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	5	150.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****			800.000.000		151.000.000			
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya ****	Unit	27	800.000.000	27	151.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			250.000.000		35.000.000			
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	9	250.000.000	9	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***			4.007.000.000		3.303.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	84	4.007.000.000	84	3.303.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				7.000.000		7.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				500.000.000		350.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	36	500.000.000	36	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				3.500.000.000		2.946.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	36	3.500.000.000	36	2.946.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				1.230.000.000		608.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	352	1.230.000.000	352	608.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				350.000.000		225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	21	350.000.000	21	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel ****				30.000.000		3.000.000		
				Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	50	30.000.000	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				100.000.000		110.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	80	100.000.000	80	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				500.000.000		200.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	500.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****			250.000.000		70.000.000			
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	200	250.000.000	200	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah *						2.400.000.000		1.373.266.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Manajemen Risiko *	Angka	3,6	2.400.000.000	3,7	1.373.266.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				2.400.000.000		1.373.266.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	2.400.000.000	100	1.373.266.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***				2.400.000.000		1.373.266.000		
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	2.400.000.000	100	1.373.266.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				900.000.000		523.129.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	16	900.000.000	17	523.129.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KENDAL; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi; PATI; TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				1.500.000.000		850.137.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	20	1.500.000.000	21	850.137.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; OPD Provinsi; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik						84.343.898.000		65.652.542.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,905		3,065		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa *					19.835.000.000		12.782.474.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik *	Nilai	3,01	19.835.000.000	3,13	12.782.474.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN **			6.485.000.000		3.743.759.000			
				Indeks Ideologi Pancasila **	Nilai	3,1	6.485.000.000	3,2	3.743.759.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ***			6.485.000.000		3.743.759.000			
				Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ***	%	85	2.474.000.000	90	183.595.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****			2.474.000.000		183.595.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Orang	2460	2.474.000.000	2952	183.595.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
				Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme ***	%	85	4.011.000.000	90	3.560.164.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****				3.711.000.000		3.367.814.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Orang	3684	3.711.000.000	4421	3.367.814.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****				300.000.000		192.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ****	Laporan	12	300.000.000	12	192.350.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN **				8.150.000.000		6.140.351.000		
				Indeks Kinerja Ormas **	Nilai	77,87	8.150.000.000	79,82	6.140.351.000	Bidang Ketahanan Bangsa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ***			8.150.000.000		6.140.351.000			
				Skor variabel program dan kegiatan ormas ***	Skor	37,31	3.900.000.000	38,59	3.740.500.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****				3.900.000.000		3.740.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****	Laporan	35	3.900.000.000	35	3.740.500.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; Bidang Ketahanan Bangsa
				Skor variabel sumber daya ormas ***	Skor	40,56	4.250.000.000	41,23	2.399.851.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****				3.850.000.000		2.035.715.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****	Orang	4700	3.850.000.000	4800	2.035.715.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; Bidang Ketahanan Bangsa
		8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****				400.000.000		364.136.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ****	Orang	400	400.000.000	450	364.136.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA **				5.200.000.000		2.898.364.000		
				Indeks Penguatan Dampak Ekonomi **	%	3,1	3.900.000.000	3,2	2.409.554.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ***				3.900.000.000		2.409.554.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ***	%	87	3.900.000.000	90	2.409.554.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****				3.900.000.000		2.409.554.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Orang	4000	3.900.000.000	4100	2.409.554.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BATANG; Bidang Ketahanan Bangsa; BOYOLALI; GROBOGAN; JEPARA; KLATEN; KOTA SALATIGA; KOTA SURAKARTA
				Indeks Toleransi **	%	74,3	1.300.000.000	74,5	488.810.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ***				1.300.000.000		488.810.000		
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ***	%	87	1.300.000.000	90	488.810.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****			1.000.000.000		295.870.000			
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Orang	900	1.000.000.000	1000	295.870.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Bidang Ketahanan Bangsa; DEMAK; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA TEGAL; MAGELANG; PEMALANG; PURWOREJO; SEMARANG; SUKOHARJO; TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****			300.000.000		192.940.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	Laporan	12	300.000.000	12	192.940.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; Bidang Ketahanan Bangsa; BLORA; BREBES; CILACAP; DKI JAKARTA; KARANGANYAR; PURBALINGGA; REMBANG; WONOGIRI; WONOSOBO
	Meningkatnya Stabilitas Politik *						64.508.898.000		52.870.068.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik *	Nilai	2,8	64.508.898.000	3	52.870.068.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK **			45.652.498.000		38.382.239.000			
				IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi **	Nilai	76	45.652.498.000	77	38.382.239.000	Bidang Politik Dalam Negri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ***			45.652.498.000		38.382.239.000			
				Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik ***	%	89,5	7.280.620.000	90	3.205.109.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			7.280.620.000		3.205.109.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Orang	12270	7.280.620.000	12270	3.205.109.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
				Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik ***	%	89,5	36.313.578.000	90	34.510.935.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			36.313.578.000		34.510.935.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Laporan	12	36.313.578.000	12	34.510.935.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
				Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi ***	%	89,5	2.058.300.000	90	666.195.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			1.121.210.000		244.450.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Dokumen	4	1.121.210.000	4	244.450.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****			937.090.000		421.745.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ****	Orang	1720	937.090.000	1720	421.745.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL **				18.856.400.000		14.487.829.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Indeks kewaspadaan Nasional **	Angka	73,5	18.856.400.000	74	14.487.829.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial ***				18.856.400.000		14.487.829.000		
				Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial ***	%	77	3.800.000.000	82	2.739.919.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			3.800.000.000		2.739.919.000			

				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****	Orang	4650	3.800.000.000	4750	2.739.919.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO
				Persentase penanganan konflik sosial ***	%	100	15.056.400.000	100	11.747.910.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			1.510.000.000		927.620.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****	Orang	5700	1.510.000.000	5700	927.620.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SUKOHARJO; TEGAL; WONOGIRI; WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****			10.846.400.000		9.310.290.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ****	Laporan	42	10.846.400.000	39	9.310.290.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ****			2.700.000.000		1.510.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ****	Laporan	12	2.700.000.000	12	1.510.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BANJARNEGARA; BANYUMAS; BATANG; Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; BLORA; BOYOLALI; BREBES; CILACAP; DEMAK; GROBOGAN; JEPARA; KARANGANYAR; KEBUMEN; KENDAL; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; KOTA SALATIGA; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KOTA TEGAL; KUDUS; MAGELANG; PATI; PEKALONGAN; PEMALANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; REMBANG; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; TEGAL; TEMANGGUNG; WONOGIRI; WONOSOBO

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana pelaksanaan tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tabel 1
Identifikasi Resiko

No	Jenis Konteks Resiko	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko	Kategori Resiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Sasaran Strategis OPD	Meningkatnya stabilitas politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Polarisasi pada masyarakat	Resiko Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 2. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 3. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis 4. Media yang berpihak/ tidak netral masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Konflik horizontal masyarakat 3. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 4. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil) 	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Resiko	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko	Kategori Resiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Munculnya intoleransi	Resiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila 2. Masih adanya sel-sel radikalisme di masyarakat yang belum teridentifikasi dan berpotensi mengganggu stabilitas ideologi Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik sosial dimasyarakat 2. Disintegrasi bangsa 	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
				Perselisihan antar ormas	Resiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kemunculan ormas-ormas baru 2. Kurangnya kemandirian ormas dalam rangka partisipatif pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat pembangunan 2. Konflik sosial dimasyarakat 	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

				Penyalagunaan narkoba	Resiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba 2. Lemahnya pengawasan dari berbagai kalangan khususnya pemerintah 3. Faktor perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merusak mental generasi muda 2. Tingkat kejahatan dan penyakit sosial masyarakat meningkat 	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
				Munculnya intoleransi	Resiko strategis	adanya anggapan agama dan kepercayaannya yang paling benar	Konflik SARA	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

				Unjuk rasa	Resiko strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik social 2. Peraturan Pemerintah yang tidak memihak masyarakat 	Konflik sosial	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
--	--	--	--	------------	------------------	--	----------------	----------------------------------

Tabel 2
Analisis Resiko

Pernyataan Resiko	Skala/Nilai Resiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Resiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Resiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Resiko
Polarisasi pada masyarakat	3	5	15	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun literasi masyarakat dalam penggunaan media 2. Membentuk Jejaring Sindikasi Konten Positif 3. Pendidikan Politik kepada masyarakat 	Memadai	3	4	12
Munculnya intoleransi	4	5	20	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tim Deradikalisasi dan Forum Pembauran Kebangsaan 	Memadai	3	4	12

					2. koordinasi dan kerjasama dari Instansi terkait seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme				
Perselisihan antar ormas	4	4	16	Ada	1. Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan 2. kegiatan dialog-dialog pemerintah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Memadai	3	3	9
Penyalagunaan narkoba	5	4	20	Ada	1. Sosialisasi tentang Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Sosial dan Budaya	Memadai	4	3	12
Munculnya intoleransi	4	5	20	Ada	1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 2. Komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama/penghayat kepercayaan	Memadai	3	4	12
Unjuk rasa	5	5	25	Ada	1. Sinergitas antar stakeholder dan masyarakat dalam menangani konflik sosial 2. Pengoptimalan data di lapangan dengan melalui penggunaan aplikasi Sistem Kewaspadaan dan Kerawanan Dini (SiWARDI)	Memadai	3	4	12

Tabel 3
Resiko Prioritas

Resiko Prioritas	Skala Prioritas	Pemilik Resiko	Sebab	Dampak
Unjuk rasa	12	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial 2. Peraturan Pemerintah yang tidak memihak masyarakat 	Konflik sosial
Polarisasi pada masyarakat	12	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 2. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 3. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis 4. Media yang berpihak/ tidak netral masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Konflik horizontal masyarakat 3. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 4. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil)
Munculnya intoleransi	12	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila 2. Masih adanya sel-sel radikalisme di masyarakat yang belum teridentifikasi dan berpotensi mengganggu stabilitas ideologi Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik sosial dimasyarakat 2. Disintegrasi bangsa
Penyalagunaan narkoba	12	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba 2. Lemahnya pengawasan dari berbagai kalangan khususnya pemerintah 3. Faktor perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merusak mental generasi muda 2. Tingkat kejahatan dan penyakit sosial masyarakat meningkat
Munculnya intoleransi	12	Kepala Badan	adanya anggapan agama dan kepercayaannya yang paling benar	Konflik SARA
Perselisihan antar ormas	9	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kemunculan ormas-ormas baru 2. Kurangnya kemandirian ormas dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat pembangunan 2. Konflik sosial dimasyarakat

			partisipatif pembangunan daerah	
--	--	--	---------------------------------	--

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja	Pernyataan Resiko	Skala Resiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Unjuk rasa	12	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial 2. Peraturan Pemerintah yang tidak memihak masyarakat	Konflik sosial	1. Peningkatan deteksi dini 2. Pembuatan peta rawan konflik	Kepala Badan	2 tahun
Meningkatnya stabilitas politik	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Polarisasi	12	1. Narasi hoaks, narasi kebencian political buzzer 2. Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat 3. Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis 4. Media yang berpihak/ tidak	1. Ketentraman Negara yang Terancam 2. Konflik horizontal masyarakat 3. Hilangnya kepercayaan publik pada hasil lembaga/ institusi pemerintahan 4. Kerentanan kohesi antar civil society (organisasi masyarakat sipil)	1. Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia 2. Pendidikan Politik 3. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kab/kota dan menjadikan media, institusi pendidikan dan keagamaan sebagai mitra pilar demokrasi	Kepala Badan	2 tahun

				netral masyarakat		4. Memperkuat Literasi media dan literasi politik		
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Intoleransi	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila 2. Masih adanya sel-sel radikalisme di masyarakat yang belum teridentifikasi dan berpotensi mengganggu stabilitas ideologi Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik sosial dimasyarakat 2. Disintegrasi bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan melibatkan unsur pentahelix untuk melakukan kegiatan kontra radikalisme. 2. Penguatan kontra radikalisme kepada pelajar melalui penyuluhan bahaya terorisme yang diisi oleh eks- napiter. 	Kepala Badan	
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyalahgunaan narkoba	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba 2. Lemahnya pengawasan dari berbagai kalangan khususnya pemerintah 3. Faktor perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merusak mental generasi muda 2. Tingkat kejahatan dan penyakit sosial masyarakat meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkotika 2. Membuat konten-konten dan sosialisasi bahaya narkoba 	Kepala Badan	
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekososbud Bidang	Intoleransi	12	adanya anggapan agama dan kepercayaannya yang paling benar	Konflik SARA	Mengoptimalkan forum-forum yang di masyarakat sehingga meminimalisir	Kepala Badan	

	Kesatuan Bangsa dan Politik					konflik antar umat beragama		
Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Ketahanan Bidang Ekosobud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Perselisihan ormas	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kemunculan ormas-ormas baru 2. Kurangnya kemandirian ormas dalam rangka partisipatif pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat pembangunan 2. Konflik sosial dimasyarakat 	Pengelolaan data dan pelayanan pendaftaran ormas sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Kepala Badan	